

Implementasi Audit Mutu Internal Pada Perguruan Tinggi Agama

Hamengkubuwono

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Curup
hamengku7@gmail.com

Abstract: *Education has become one of the most important instruments in the transformation of human civilization. Thus, the establishment of Islamic Higher Education institution has indicated the responsibility of community on development of this nation. Then, in this modern era, the process of competition among nations has determined by the quality of education. A nation will be known well as strong and advanced nation if the citizen has independence in the culture, economic and politics. Certainly, this matter depended on the role of education side. Thereby, there would be an actualization of human authority in contributing the valuable matters in order to realize a better quality of the nation.*

Keywords: *Evaluation, quality audit, Islamic Higher Education Institution*

Abstrak: Pendidikan menjadi instrumen penting dan bernilai strategis dan transformasi peradaban masyarakat. Upaya mendirikan PTAI, menunjukkan besarnya tanggung jawab umat terhadap pembangunan negara dan bangsa, bahwa dalam proses persaingan antar bangsa di abad modern, ditentukan oleh kualitas pendidikan. Sebuah bangsa yang kuat dan maju kalau masyarakatnya memiliki kemandirian berbudaya, berekonomi dan berpolitik. Yang demikian ini bergantung pada peranan dunia pendidikan. Dengan kemandirian, akan terwujud otoritas masyarakat untuk memberikan sesuatu yang berarti ke arah perubahan iklim kehidupan kebangsaan yang berkualitas.

Kata Kunci : *Evaluasi, Audit Kualitas, Perguruan Tinggi Islam*

Pendahuluan

Kehadiran Perguruan Tinggi Agama (PTAI) merupakan wujud dari kepedulian negara terhadap kompleksitas permasalahan masyarakat Islam. Secara kuantitatif jumlah IAIN dan STAIN se-Indonesia tergolong banyak kalau dibandingkan dengan universitas negeri yang ada. Hal ini sebagai indikasi betapa pemerintah peduli terhadap permasalahan umat Islam. Kehadiran IAIN dan

STAIN yang bertebaran di seluruh propinsi dan kabupaten maupun kota, dimaksudkan untuk mendorong percepatan transformasi peradaban umat, sekaligus umat memiliki kesiapan berbudaya dalam persaingan modernisasi.

Sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Tahun 2009-2011 pembangunan pendidikan Tinggi Agama Islam didasarkan pada tiga pilar utama, yaitu “Pemerataan dan Perluasan akses pendidikan, peningkatan mutu, relevansi dan daya saing. Dan peningkatan tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik”.¹ Apa yang menjadi harapan diatas, sejalan dengan rumusan tujuan pendidikan tinggi yang tertuang dalam peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi di kemukakan Tujuan pendidikan tinggi adalah :

1. Menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan/atau profesional yang dapat menerapkan, men
2. gembangkan dan/atau menciptakan ilmu pengetahuan teknologi dan/atau kesenian;
3. Mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.²

Sesuai dengan fungsi kelembagaan yang mengusung misi suci agama yang berada dalam suatu kawasan dengan tingkat perkembangan yang dinamis, maka mulai tingkat perencanaan program hingga komunikasi program setidaknya diorientasi pada pencapaian tujuan optimal dalam lembaga, sehingga diharapkan mempunyai efek kualitas pembelajaran dan kualitas lulusan.

Salah satu kebijakan pemerintah dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia adalah menciptakan lembaga pendidikan tinggi yang berorientasi kepada peningkatan kualitas *outcome*, sehingga lembaga perguruan tinggi akan memiliki nilai strategis dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Perguruan tinggi berfungsi untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Pendidikan tinggi harus mampu memberikan apa yang diharapkan oleh pengguna lulusan (pasar kerja) serta memenuhi kebutuhan pengembangan ilmu pengetahuan secara konsisten dan terprogram. Kecepatan perkembangan ilmu dan teknologi telah memberikan

¹ Departemen Agama, *Panduan Pendirian PTAI*, (Jakarta : DEPAG : 2008), hlm.11.

² Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 Tentang Pendidikan Tinggi Pasal 2, ayat 1.

tekanan pada perguruan tinggi dalam berbagai hal seperti fasilitas, struktur organisasi serta sumber daya manusia.

Hal ini telah di atur dalam peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan, dikemukakan :

1. Setiap satuan pendidikan pada jalur formal dan Nonformal wajib melakukan penjamin mutu pendidikan.
2. Penjamin mutu pendidikan sebagaimana di maksud pada ayat (1) bertujuan untuk memenuhi atau melampaui standar Nasional Pendidikan.
3. Penjamin mutu pendidikan sebagai mana di maksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, sistematis, dan terencana dalam satu program penjamin mutu yang memiliki target dan kerangka waktu yang jelas.³

Pada bagian lain, yang dituangkan dalam peraturan pemerintah Nomor 17 Tahun 2000, ditegaskan bahwa: “pemerintah melakukan dan/atau memfasilitasi penjaminan mutu pendidikan dengan berpedoman pada kebijakan nasional dan standar nasional pendidikan”.⁴

Instruksi presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintah negara untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya, pelaksanaan kebijakan, dan program penyusunan rencana strategik, rencana kinerja dan pengukuran kinerja.⁵

Lembaga Pendidikan Tinggi Agama tidak akan dapat mewujudkan visi dan misinya secara baik bilamana tidak menghiraukan aspek manajemen mutu, sebagaimana di katakan Robert N. Anthony menyatakan *“We shall refer to the person who is responsible for designing and operating the management control system as the controller. Actually, in many organization, the title of this is chief financial office”*.⁶

Hal yang seharusnya terjadi secara ideal, PTAI sesungguhnya merupakan sosok yang harus tampil sebagai lembaga Perguruan Tinggi Islam yang ideal.

³ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan, Bab XV, pasal 91, ayat 1, 2 dan 3.

⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang pengelolaan dan Penyelenggara Pendidikan, Bab II pasal 13 ayat 1.

⁵ Lampiran Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Laporan Akuntabilitas kinerja satuan organisasi/kerja dilingkungan Departemen Agama. Bab I ayat 1.

⁶ Robert N. Anthony, *Management Control System* (Boston, Irwin Mc Gear. Hill : 1998) hlm. 106.

Sebab, dilihat dari sumber daya manusia di dalamnya terdiri dai pengajar yang memiliki pengetahuan agama sangat cukup. Akan tetapi pada kenyataannya tidak sedikit tenaga dosen yang bekerja dengan etos dan kualitas rendah. Hal inilah yang mengakibatkan perkembangan kampus dikenal lambat dan bahkan stagnan sebagaimana banyak dan mudah kita temukan di lapangan. Fenomena ini semestinya membawa kesadaran bagi kita bahwa membangun sistem, dan organisasi yang kukuh sangat memerlukan manajemen mutu. Nilai dan norma tetap dipandang penting, akan tetapi hal itu harus dilengkapi perangkat lain untuk menopangnya.

Fenomena di atas, jika dibiarkan berlangsung dari hari kehari diduga akan berdampak pada kualitas lembaga secara keseluruhan. Fenomena yang terjadi tersebut menunjukkan belum sempurnanya unit penjamin mutu dalam melaksanakan kegiatan audit dan program lainnya, implikasinya berdampak pada berbagai mutu pendukung kualitas lembaga.

Pembahasan

Salah satu pelopor gerakan mutu adalah *W. Edgard Deming*. Awalnya *deming* berkenalan dengan konsep dasar manajemen tradisional pada akhir tahun 1920-an, saat bekerja sebagai pegawai paruh waktu dipembangkit listrik milik *westrn electric* yang terkenal di Chicago. Pengalaman ini membawa pertanyaan “bagaimana cara terbaik untuk perusahaan dalam memotivasi karyawan?” Deming menemukan sistem motivasi tradisional yang digunakan pada masa itu tidak cocok lagi dan secara ekonomis tidak produktif. Dalam sistem tersebut, pemberian insentif dikaitkan dengan jenis pekerjaan dengan harapan dapat memperbesar output pekerja, yang dilanjutkan dengan infeksi atas proses kerja termasuk mencatat butir-butir kesalahan pekerjaan karyawan. Selanjutnya *deming* mengakui bahwa proses manajemen yang terkontrol secara campur tangan, sekaligus menentukan waktu yang tepat membiarkan proses berjalan.

Gerakan mutu terpadu dalam pendidikan masih tergolong baru. Hanya ada sedikit literatur yang memuat referensi tentang hal ini sebelum 1980-an. Beberapa upaya reorganisasi terhadap praktek kerja dengan konsep *Total Quality managemant* (TQM) telah dilaksanakan oleh beberapa universitas di Amerika dan pendidikan tinggi di Inggris. Inisiatif untuk menerapkan metode tersebut berkembang lebih dahulu di Amerika dan baru kemudian diinggris, namun baru diawal 1990-an kedua negara tersebut betul-betul dilanda gelombang metode tersebut. Ada banyak gagasan yang dihubungkan dengan mutu yang

dikembangkan dengan baik oleh institusi-institusi pendidikan tinggi dan gagasan-gagasan mutu tersebut diteliti dan diimplementasikan disekolah-sekolah.

Ada semacam keengganan tradisional dalam beberapa institusi pendidikan untuk menerapkan metodologi dan bahasa manajemen insdutri. Hal ini kemungkinan menjadi penyebab jauhnya pendidikan dari visi gerakan mutu. Beberapa pelaku pendidikan tidak suka menarik analogi antara proses pendidikan dan penciptaan produk-produk insdustri. Peningkatan mutu menjadi semakin penting bagi institusi yang digunakan untuk memperoleh kontrol yang lebih baik melalui usaha sendiri. Kebebasan yang baik harus disesuaikan dengan akuntabilitas yang baik. Institusi harus mampu menunjukkan bahwa mereka mampu memberikan pendidikan yang bermutu pada pelanggan.

Konsep TQM telah memperoleh dukungan resmi, kurang lebih dari 16 institusi pendidikan. Dewan faktor dan kepala sekolah juga sudah mengublikasikan *Teaching standar and Excellence in Higker Education* pada tahun 1991, dengan sub judul *Developing a culture For quality*. Dalam kesimpulan buku tersebut, penulis menyatakan bahwa masing-masing universitas harus mengembangkan total quality manajemennya sendiri-sendiri.⁷

Ada tiga postulat yang mendasar pentingnya pengurusan mutu, yaitu :

*Postulate 1 -All chance systems of causes are not a like in the sense that they enable us to predict the future in terms of the past ... Postulate 2 -constant system of chance causes do exist in nature ... Postulate 3 – Assignable causes of variotion may be found and eliminated.*⁸

Mutu tidak identik dengan kemewahan, harga yang mahal, timbangan yang berat, aroma yang harus dan sebagainya. Menurut *John Macdonald*, bahwa mutu”memenuhi persyaratan/kebutuhan”.⁹ Dalam kamus Bahasa Indonesia kata mutu diartikan “Nilai, keadaan, ukuran keaslian emas, mutiara”.¹⁰ Definisi lain mengatakan bahwa mutu adalah “gambaran dan karakteristik menyeluruh dari barang/jasa yang menunjukkan kemampuannya dan memuaskan konsumen sesuai dengan kebutuhan yang ditentukan”.¹¹ Dalam definisi lain yang tertuang dalam kamus Indonesia-Inggris kata ;mutu “memiliki arti dalam bahasa Inggris

⁷ Edward Sallis, *Total Quality Managemet in Education Ahmad Ali Riyadi dan Fabrurrozi. Manajemen Mutu Pendidikan* (Yogyakarta : incisod, 2008), hlm. 46.

⁸ James w. Cortada dan John A woods. *The Quality Yearbook*, (New York : Mc Graw-Hill, 1997), hlm. 17-21.

⁹ John Macdonald, *Total Quality yang sukses* (Jakarta, Mega Poin : 1994), hlm. 5.

¹⁰ Kamisa, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* (Surabaya, kartika : 1997), hlm.372

¹¹ Iso 9000 tentang Sistem Manajemen Mutu

Quality artinya taraf atau tingkatan kebaikan; nilai sesuatu”.¹² Sementara itu *John Stermat*, memberikan batasan bahwa “mutu adalah perasaan menghargai bahwa sesuatu lebih baik dari pada yang lain, mutu dalam manajemen lebih dari rata-rata dengan harga yang wajar, mutu juga berarti memfokuskan pada kemampuan menghasilkan produk dan jasa berarti melakukan hal-hal yang tepat dalam organisasi pada langkah pertama, bukannya membuat dan memperbaiki kesalahan.

Dengan memfokuskan hal-hal yang tepat pada kesempatan pertama, organisasi menghindari biaya tinggi yang berkaitan dengan pengerjaan ulang”. Selanjutnya I Wayan Simri Wicaksana, mengutip pendapat Juran (1988) bahwa “Mutu adalah *Fitness for Use* (kesiapan untuk bekerja), Crosby (1979) mengatakan sesuatu yang dikatakan bermutu bila memenuhi persyaratan, Ton Vroinjenstijn (2002) menyatakan bahwa mutu (*Quality*) merupakan kondisi dasar untuk mampu berkompetensi, memiliki daya tarik (*attractiveness*) dan untuk bisa bertahan (*Survival*).¹³

Berdasarkan berbagai definisi di atas, maka mutu terkandung beberapa unsur, yaitu:

- a. Mutu mempunyai nilai di atas rata-rata artinya melebihi keinginan dari pemakaian.
- b. Mutu memenuhi persyaratan yang dipersyaratkan.
- c. Mutu tidak memperlihatkan kekurangan atau cacat.
- d. Kebutuhan akan mutu selalu berubah sesuai dengan perkembangan.
- e. Mutu menjadi alat promosi yang handal.
- f. Mutu menggambarkan jaminan (produk, jasa ataupun proses).
- g. Mutu tidak dapat di manipulasi.
- h. Mutu tidak dapat di beli.
- i. Mutu akan dapat tercapai apabila dilakukan dengan jaminan mutu.
- j. Mutu akan selalu berubah sesuai dengan sistem mutu dan jaminan mutu.

Jika mutu di kaitkan dengan pendidikan atau mutu pendidikan adalah “pencapaian tujuan dan kompetensi lulusan yang telah ditetapkan oleh instansi pendidikan Tinggi di dalam rencana strategisnya atau kesesuaian dengan standar yang telah ditetapkan”. Dengan kata lain bahwa “mutu pendidikan dapat mencakup aspek sarana/prasana, yang dapat memuaskan pelanggan internal

¹² <http://weblog-pendidikan.blogspot.com/2009/08/definisi-mutu-html20/03/2010>.

¹³ Wayan Simri Wicaksana, *Model Open Source dan open Content untuk Meningkatkan Mutu Pendidikan*. (Yogyakarta : UGM, 2002), hlm. 7

(pengajar, staf administrasi, pengelola lembaga pendidikan) serta pelanggan eksternal (peserta didik, orang tua, masyarakat pengguna serta masyarakat yang lebih luas)”.

Di tinjau dari pendekatan proses audit mutu sudah termasuk dalam fungsi manajemen. Pendekatan proses dalam manajemen yang termasuk dalam fungsi manajemen. Pendekatan proses dalam manajemen yang tertuang dalam buku *General and Industrial Management* oleh Henry Fayol, dia mengidentifikasi lima fungsi manajemen yaitu “perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), komando (*command*), koordinasi (*coordination*), kontrol (*control*).

Pada tahun 1937 Luther Gulick menyebutkan fungsi manajemen dengan sebutan POSDCORB, yaitu : P (*Planning*), O (*Organizing*), S (*staffing*), D (*Directing*), Co (*Coordinating*), R (*Reporting*) dan B (*Budgeting*). George Terry menggunakan istilah POAC yang Akronim dari *Planning, Organizing, Actuating dan Controlling*. Sedangkan Koontz dan O Donnell memakai istilah *planning, organizing, staffing, directing dan controlling*.¹⁴

Dalam semua fungsi manajemen di atas, semua tokoh berpendapat bahwa unsur pengawasan atau audit menjadi sesuatu yang substansi. Pengawasan atau audit di maksud untuk mengawasi proses, prosedur, teknik dalam mencapai tujuan.

Konsep audit mutu dalam dunia pendidikan juga telah di tuangkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem pendidikan Nasional, sebagai mana dinyatakan bahwa : “Sistem Pendidikan Nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional dan global sehingga perlu dilakukan pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah dan berkesimpulan”.¹⁵ Selanjutnya di dalam peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, dikemukakan “setiap satuan pendidikan pada jalur formal dan non formal wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan”.¹⁶

¹⁴ Soebagio Atmodiwirio, *Manajemen Pendidikan Indonesia* (Jakarta; Adadizya Jaya, 2000), hlm.7-8

¹⁵ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang *Sistem Pendidikan Nasional* (Jakarta, Fokus Media : 2005), h.h.93-94

¹⁶ Peraturan pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang *Standar Nasional Pendidikan* Bab XV Pasal 91 ayat (1) ayat (1) (Jakarta, fokus Media : 2005), hlm.56.

Perkembangan manajemen mutu begitu cepat kemajuannya sebagai akibat dari perubahan yang cepat dalam mengelola jaminan mutu di dunia. Untuk memimpin dan menjamin keberlangsungan sebuah lembaga seperti halnya perguruan tinggi dapat berjalan dengan baik, perlu untuk mengarahkan dan mengendalikannya dengan cara sistematis dan transparan. Keberhasilan akan dapat dicapai bilamana diimplementasikan dan pemeliharaan konsep manajemen mutu yang di desain terus dilakukan dengan selalu memperbaiki dan menanggapi kebutuhan semua pihak yang berkepentingan. Hal ini sejalan dengan pernyataan yang tertuang dalam *Higher Education Long Term Strategy* atau HELTS (2003-2010) yang menyatakan : *In a healthy organization, a continuous quality improvement should become its primary concern. Quality assurance should be internally driven, institutionalized within each organization's standards procedure and could also involve external parties. However, since quality is also a concern of all stakeholders, quality improvement should aim at producing quality outputs and outputs as part of public accountability.*¹⁷

Pernyataan di atas, sesuai dengan visi pendidikan Tinggi Indonesia 2010 yaitu : *In order to contribute to the nation's competitiveness, the national higher education has to organizationally healthy, and the same requirement also applies to institution, A structural adjustment in the existing system is, however, needed to meet this challenge. The structural adjustment aims, by the year. Of 2010, of having a healthy higher education system, affectivity. Coordinated and demonstrated by the following features. Access and equity. Autonomy.*¹⁸

Berdasarkan pernyataan di atas, akan mengantarkan para penyelenggara perguruan tinggi ke arah sebuah manajemen mutu yang transparan, konsisten dan perbaikan yang berkesinambungan. Transparan maksudnya adalah memberitahukan, mensosialisasikan, menyampaikan dan melaksanakan target, janji, komitmen mutu yang akan dicapai. Dalam rangka penjaminan dan pemenuhan persyaratan kepuasan pelanggan harus dilakukan proses perbaikan mutu secara berkesinambungan atau terus menerus.

Menunjuk kepada *International Standar Quality Management system requirements*, bahwa kebijakan mutu termasuk di perguruan tinggi, yaitu :

1. *Top management shall ensure that the quality policy :*
 - a) *Is appropriate to the purpose of the organization*
 - b) *Includes a commitment to comply with requirements and continually improve the effectiveness of the quality management system.*

¹⁷ Luthfi Hasan, *Quality Assurance in Higher Education*, (Yogyakarta, CDIE : 2004), hlm.13.

¹⁸ Visi Pendidikan Tinggi 2010.

- c) *Provides a frame work for establishing and reviewing quality objectives.*
 - d) *Is communicated and understood within organization and,*
 - e) *Is reviewed for continuing suitability.*
2. *Top management shall ensure that quality objectives, including those needed to meet requirements for product, are established at relevant functions and levels within the organization. The quality objectives shall be measurable top consistent with shall ensure that.*
- a) *The planning of the quality management system is carried out in order to meet the requirement, as well as the quality objectives, and*
 - b) *The integrity of the quality management system is maintained when changes to the quality management system are planned and implemented.*¹⁹

Dalam bahasa Indonesia, kurang lebih maksudnya adalah top manajemen harus memastikan bahwa kebijakan mutu :

1. Sesuai dengan tujuan organisasi
2. Mencakup komitmen untuk memenuhi persyaratan dan terus menerus memperbaiki keefektifan sistem manajemen mutunya.
3. Menyediakan kerangka untuk menetapkan dan meninjau sasaran mutu.
4. Dikomunikasikan dan dipahami dalam organisasi.
5. Ditinjau agar terus menerus sesuai.

Top manajemen harus memastikan bahwa sasaran mutu, termasuk yang diperlukan untuk memenuhi persyaratan produk ditetapkan pada fungsi dan tingkat relevan dalam organisasi. Sasaran mutu harus terukur dan taat azas dengan kebijakan mutu. Untuk itu sebuah lembaga harus menetapkan, mendokumentasikan, menerapkan dan memelihara sistem manajemen mutu dan terus menerus memperbaiki ke-efektifannya sesuai dengan persyaratan yang ada.

Hampir semua lembaga yang memiliki kredibilitas yang baik menerapkan persyaratan-persyaratan umum di atas. Jika divisualisasikan dalam sebuah alur, dapat disimpulkan bahwa bangunan sistem kebijakan mutu pada perguruan tinggi adalah :

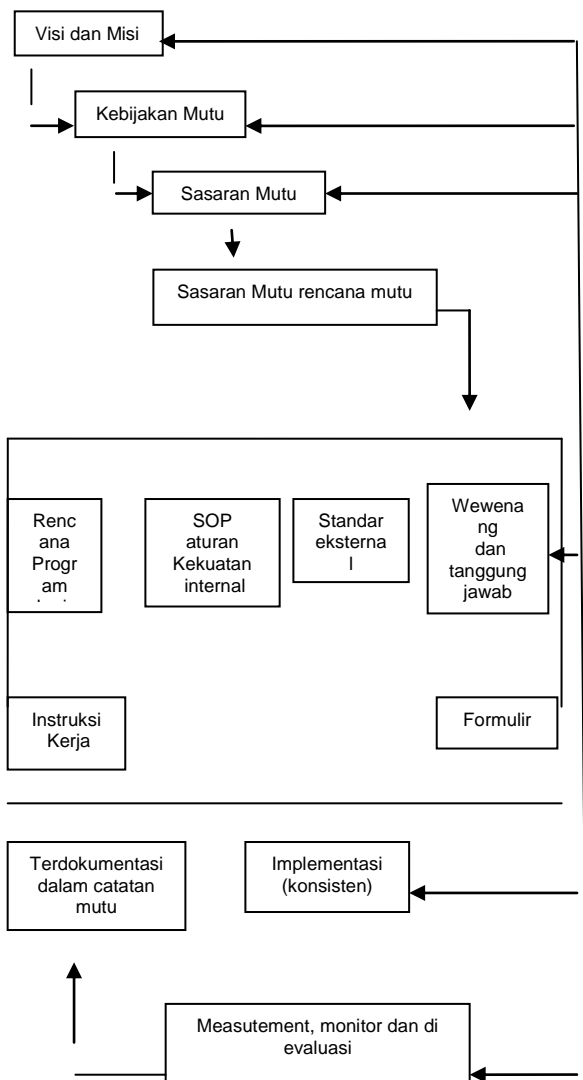
1. Sistem dibangun dari manajemen puncak (*Top Management*).
2. Deklarasi sistem manajemen mutu tentang; visi; kebijakan mutu; sasaran mutu; manajemen mutu.

¹⁹ International Standar Quality Management System requirements ISO 9001 : 2008 (Zwitzerland, 2008), hlm. 4

3. Penyusunan Dokumen sistem manajemen mutu, yang mencakup: Standar operating prosedur (SOP); instruksi kerja (IK); dan wewenang dan tanggung jawab (WT)
4. Implementasi
5. Audit Mutu Internal (AMI)
6. Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) dan
7. Tindak Lanjut Perbaikan (TLP)

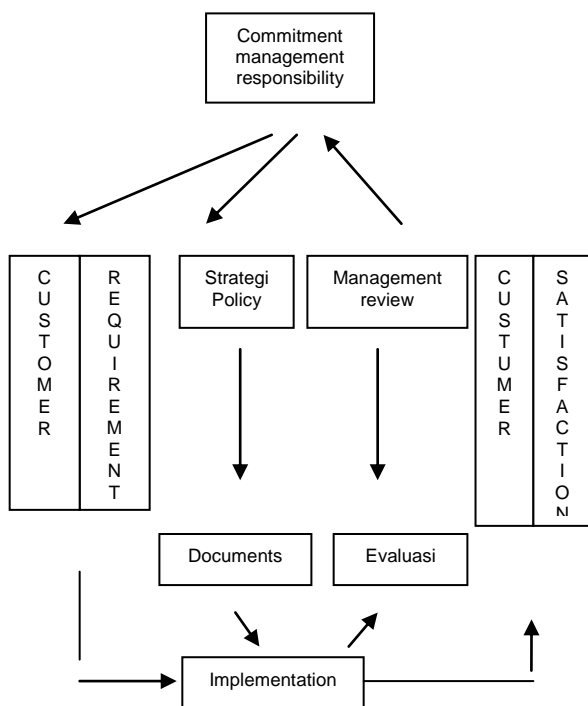
Skematiknya adalah sebagai gambar 1.

Skema sederhana manajemen mutu



Bentuk skema lain yang lebih sederhana dalam kebijakan manajemen peningkatan mutu pendidikan dalam lingkup pendidikan tinggi dapat di tampilkan sebagai berikut :

Gambar 2.
Skema Perbaikan Bekelanjutan



Untuk menjamin kebijakan mutu atau manajemen mutu diperguruan tinggi Islam, diperlukan audit mutu internal, hal ini dimaksudkan untuk menjamin atau memastikan bahwa lembaga tersebut melakukan proses pendidikan dan menghasilkan lulusan sesuai kualitas yang dijanjikan, memenuhi standar tertentu dan memuaskan pelanggan.

Penerapan audit mutu internal yang baik dan terkendali dalam lembaga pendidikan tinggi Islam akan berdampak kepada :

1. Kepastian konsisten mutu lulusan yang dihasilkan.
2. Pengurangan kerja ulang sehingga menghemat biaya.
3. Memastikan tercapainya *Quality Assurance* atas semua proses yang dikerjakan.
4. Melengkapi manajemen dengan instrumen yang memungkinkan pemantauan pencapaian mutu yang lebih ketat.

5. Meningkatkan kejelasan tanggung jawab dan wewenang di berbagai fungsi.
6. Mendukung secara langsung semua program pengembangan yang lain.
7. Peningkatan komunikasi antar unit kerja.
8. Peningkatan efektivitas dan efisien.
9. Dokumentasi dan pengukuran yang dilakukan menjadi dasar untuk *Continuous improvement*.

Penerapan audit mutu internal memberi dampak pula terhadap dinamika perguruan tinggi, paling tidak memberikan dampak pada peningkatan *Quality image* dan merupakan *competitive advantage* perguruan tinggi, membuka akses eksternal yang luas, dan meningkatkan kepercayaan dampak kepada staf, yaitu :

1. Ada kejelasan tugas, wewenang dan tanggung jawab setiap jabatan.
2. Adanya kepuasan kerja, sebagai akibat dari adanya sistem dan prosedur kerja yang baik.
3. Adanya keyakinan akan kebenaran cara penanganan pekerjaan.
4. Memunculkan para pegawai yang berpotensi dan berprestasi karena iklim promosi jabatan yang sehat.

Begitu pula terhadap mahasiswa, audit mutu internal yang baik akan berdampak pada :

1. Kepastian bahwa semua proses dilakukan berdasarkan standar mutu.
2. Adanya jaminan bahwa komitmen lembaga terhadap mahasiswa akan dapat dipenuhi karena adanya perbaikan berkelanjutan.
3. Terbukanya wadah untuk menyampaikan saran, harapan, keluhan yang secara pasti akan di tanggapi.
4. Terwujudnya pada budaya pelayanan prima.

Secara normatif, dasar yuridis penyelenggaraan audit mutu internal guna penjaminan mutu pendidikan tinggi adalah :

1. Setiap satuan pendidikan pada jalur formal dan non formal wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan.
2. Penjaminan mutu pendidikan sebagai mana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memenuhi atau melampaui standar nasional pendidikan.
3. Penjamin mutu pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, sistematis dan terencana dalam satu program penjaminan mutu yang memiliki target dan kerangka waktu yang jelas.²⁰

²⁰ Peraturan Pemerintah republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005, Tentang Standar Nasional Pendidikan. Bab XV Pasal 91, ayat 1, 2, 3.

Dalam *Guiding principles* pengembangan sistem penjamin mutu dan dikemukakan : 1) *In a healthy it's organization, a continous quality improvement should become it's primary cocern;* 2) *Quality Ansurance should be internally driven, Institutionallized within each organization's standard procedure and could also involue external parties;* 3) *Quality improvement should aim at producing quality outputs and out comes as a part of public accountability;* dan 4) *Profesional asspciatio's and other independet, could play a key role in conducting an objective external control and audit based on certain standard.*²¹

Kegiatan audit mutu internal dimaksudkan untuk pengendalian mutu. Hal ini tertuang dalam undang-undang republic Indonsia nomor 20 tahun 2003 yang menyatakan “evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan secara nasional sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan”.²² Audit mutu internal didukung pula oleh pemikiran juran, yang dikenal dengan “*The Juran Trillogy*” dikemukakan bahwa :

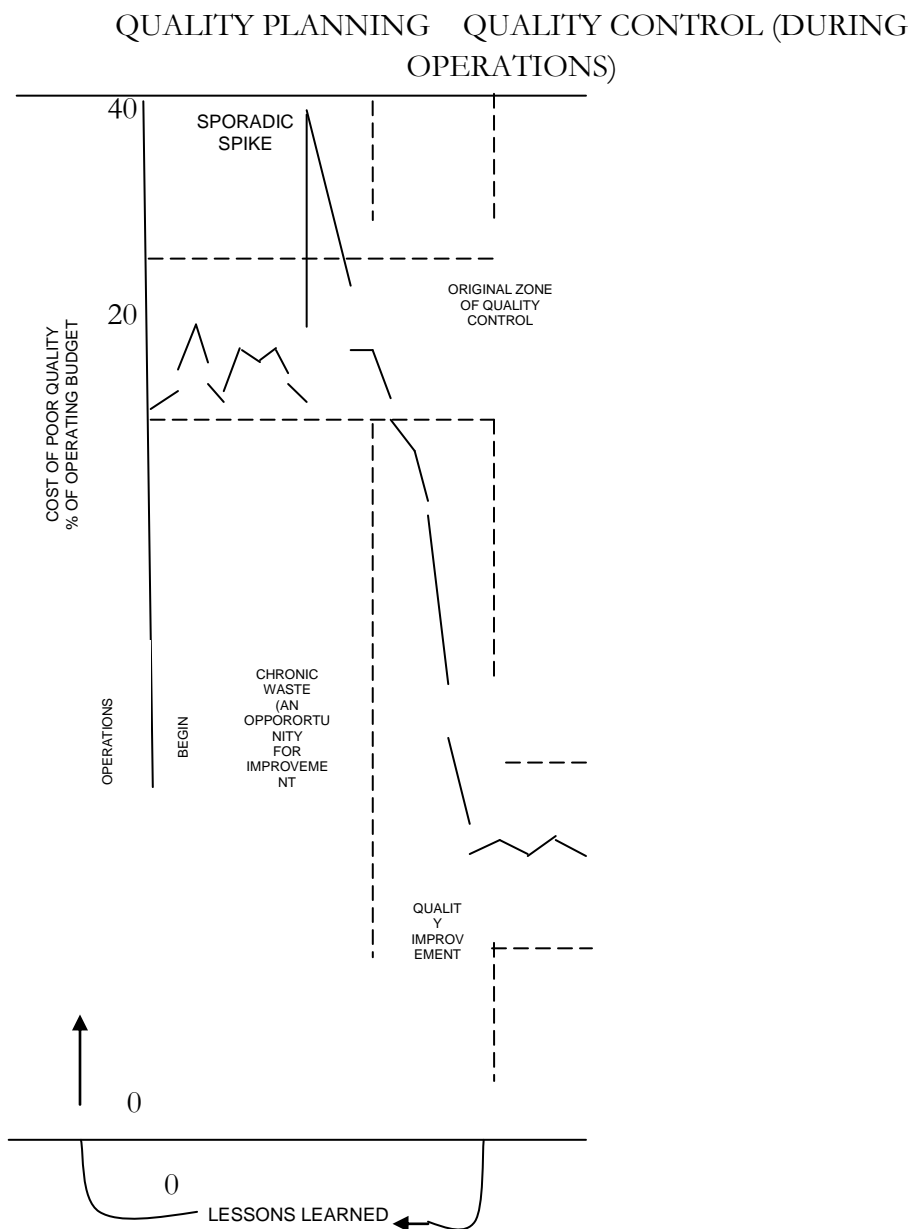
*“Quality planning is one the three basic managerial processes through which we manage for quality. The three processes (The Juran Trillogy) are interrelated. It is useful to look at that interrelationship before going specifically into what is quality planning. A simple diagram (figure 3) shows the interrelationship”.*²³

²¹ Anon, *Guiding Principles Pengembangan sistem Penjaminan Mutu* (HEITS 2003-2010).

²² Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 57 ayat 1.

²³ J.M Juran. *Juran On Planning For Quality* (Newyork : The Free Press, 1988) hlm.11-12.

Gambar 3.
The Juran Trilogy



Selanjutnya Juran juga mengemukakan : *If we sideways we soon see that those three processes-planning, control and improvement-have been around for some time. They have been used in finance for centuries-long enough to evolve some standardized terminology. The table below gives some example :*

TRILOGY PROCESSES	FINANCIAL TERMONOLOGY
<i>Quality Planning</i>	<i>Budgeting, business planning</i>
<i>Quality Control</i>	<i>Cost control, expense control, inventory control.</i>
<i>Quality improvement</i>	<i>Cost reduction, profit improvement.</i>

*What new is applying the trilogy concept to managin for quality and doing so with a structured approach.*²⁴

Menurut pemikiran lain, bahwa : Several specific purpose of internal audits are given below. When such audits are adequately sipportes and properly conducted, the results will provide valuable data to :

- 1. Measure the efficiency of quality of quality systems.*
- 2. Evaluate the effectiveness of company policy implementation.*
- 3. Ascertain whether company objectives and customer requirements are being satisfied.*
- 4. Improve cost effectiveness.*
- 5. Evaluate the effectiveness of people in the implementation of quality plans.*
- 6. Identify potential problem areas.*
- 7. Provide the company with documentation, for custumer assurance, that necessary controls are implemented, and are performing satisfactorily.*
- 8. Predict customer reaction to quality.*
- 9. Reduce custumer complaints.*²⁵

Dari berbagai pemikiran di atas, maka dilakukanlah kegiatan audit dalam upaya memperbaiki, mempertakan dan atau meningkatkan mutu yang telah di tetapkan. Audit adalah “proses yang sistematik, independen dan terdokumentasi untuk memperoleh bukti audit dan mengevaluasinya secara objektif untuk menentukan sampai sejauh mana kriteria audit dipenuhi”. Audit dipakai untuk menentukan sejauh mana persyaratan sistem manajemen mutu dipenuhi.

²⁴ *Ibid*, hlm.12-13

²⁵ Glenn E. Hayes dan Harry G. Romig. *Modern Quality Control* (London : Collier macmillan, 1977), hlm. 696

Temuan audit dipakai untuk mengetahui keefektifan sistem manajemen mutu dan untuk mengidentifikasi peluang perbaikan”.²⁶

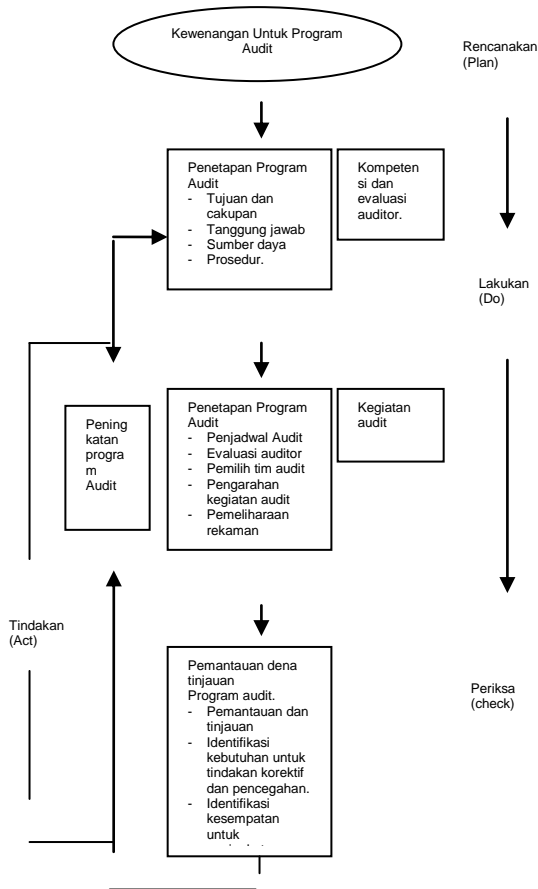
Dalam *international standar* dikemukakan bahwa : *The organization shall conduct internal audits at planned intervals to determine whether the quality management system...An audit programme shall be planned, taking into consideration the status and importance of the processes and areas to be audited, as well as the results of previous audits. The audit criteria, scope, frequency and methods shall be defined, scope, frequency and conduct of audits shall ensure objectivity and impartiality of the audit process. Auditors shall not audit their own work.*²⁷

Audit mutu internal baik secara yuridis maupun filosofis harus dilakukan dalam upaya mengevaluasi sistem manajemen mutu audit mutu internal mencakup seluruh kegiatan yang diperlukan untuk perencanaan dan pengorganisasian tipe dan jumlah audit. Disamping itu dimaksudkan untuk menyediakan sumber daya dalam upaya melaksanakan audit secara efektif dan efisien dalam jangka waktu yang telah ditetapkan. Secara teoritis aliran proses untuk pengelolaan suatu program audit digambarkan sebagai berikut :

²⁶ Badan Standar Nasional, *Panduan Audit Sistem Manajemen mutu dan/ atau Lingkungan* (Jakarta : BSN, 2005), hlm.1

²⁷ Badan Standarisasi Nasional Sistem Manajemen Mutu, *Dasar-dasar dan kosa kata* (Jakarta: BSN, 2001), hlm. 6

Gambar 4.
Aliran Proses untuk pengelolaan suatu program audit.



Dari gambar di atas, dapat dijelaskan bahwa audit mutu internal, memuat tentang :

1. Perencanaan dan penjadualan audit;
2. Pemastian kompetensi auditor dan ketua tim audit;
3. Pemilihan tim audit yang sesuai dan penetapan tugas dan tanggung jawabnya;
4. Pelaksanaan audit;
5. Pelaksanaan tindak lanjut audit, bila diperlukan;
6. Pemeliharaan rekaman program audit;
7. Pemantauan kinerja dan keefektifan program audit;

8. Pelaporan kepada manajemen puncak tentang keseluruhan pencapaian program audit.

Kesimpulan

Kebutuhan dilakukannya evaluasi implementasi audit mutu internal agar ada kebijakan mutu dan sasaran mutu tetap menjadi fokus perhatian untuk mengarahkan lembaga. Perhatian ini akan mempengaruhi hasil yang diinginkan dan membantu lembaga dalam penggunaan sumber dayanya dalam upaya mencapai tujuan. Audit internal memberi kerangka kerja bagi penetapan dan peninjauan sasaran mutu. Dengan demikian akan terjadi suatu konsistensi dengan kebijakan mutu dengan kebijakan mutu dan perbaikan kesinambungan serta pencapaiannya perlu terukur.

Kegiatan audit mutu internal yang terselenggara secara baik akan terlihat dari tersedia dokumen-dokumen analisis mutu yang meliputi :

1. Dokumen-dokumen manajemen puncak tentang bangunan mutu yang diharapkan.
2. Adanya deklarasi sistem penjaminan mutu dengan agenda :
3. Tersedianya dokumen-dokumen sistem penjamin mutu, di antaranya :
4. Tersedianya semua pedoman tentang implementasi rencana kebijakan mutu.
5. Terselenggaranya kegiatan audit mutu internal (AMIN).
6. Terselenggaranya rapat tinjauan manajemen (RTM) dan
7. Tersedianya langkah-langkah tindak lanjut perbaikan.

Daftar Pustaka

- Anon, *Guiding Principles Pengembangan sistem Penjaminan Mutu* (HEITS 2003-2010).
- Badan Standar Nasional. 2005. *Panduan Audit Sistem Manajemen mutu dan/atau Lingkungan* Jakarta. BSN.
- Badan Standarisasi Nasional Sistem Manajemen Mutu. 2001. *Dasar-dasar dan kosa kata* Jakarta. BSN.
- Departemen Agama, 2008, *Panduan Pendirian PTAI*. Jakarta. DEPAG.
- Edward Sallis, 2008. *Total Quality Managemet in Education Ahmad Ali Riyadi dan Fabrurrozi. Manajemen Mutu Pendidikan*, Yogyakarta. incisod.
- Glenn E. Hayes dan Harry G. Romig. 1977. *Modern Quality Control*. London. Collier Macmillan.
- <http://weblog-pendidikan.blogspot.com/2009/08/definisi-mutu.html20/03/2010>.
- International Standar Quality Management System requirements ISO 9001 : 2008.
- Iso 9000 tentang Sistem Manajemen Mutu
- J.M Juran. 1988. *Juran On Planning For Quality*. Newyork. The Free Press.
- James w. Cortada dan John A woods. 1997. *The Quality Yearbook*. New York.Mc Graw-Hill.
- John Macdonald, 1994 *Total Quality yang sukses*. Jakarta.Mega Poin.
- Kamisa, 1992. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Surabaya. Kartika.
- Lampiran Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Laporan Akuntabilitas kinerja satuan organisasi/kerja dilingkungan Departemen Agama. Bab I ayat 1.
- Luthfi Hasan. 2004. *Quality Assurance in Higher Education*, Yogyakarta. CDIE.
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang pengelolaan dan Penyelenggara Penddikan, Bab II pasal 13 ayat 1.

- Peraturan pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang *Standar Nasional Pendidikan* Bab XV Pasal 91 ayat (1) ayat (1).
- Peraturan Pemerintah republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005, Tentang Standar Nasional Pendidikan. Bab XV Pasal 91, ayat 1, 2, 3.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 Tentang Pendidikan Tinggi Pasal 2, ayat 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan, Bab XV, pasal 91, ayat 1, 2 dan 3.
- Robert N. Anthony, 1998, *Management Control System*, Boston, Irwin Mc Gear. Hill.
- Soebagio Atmodiwirio. 2000. *Manajemen Pendidikan Indonesia*. Jakarta. Adadizya Jaya.
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 57 ayat 1.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang *Sistem Pendidikan Nasional*.
- Visi Pendidikan Tinggi 2010.
- Wayan Simri Wicaksana, 2002. *Model Open Source dan open Content untuk Meningkatkan Mutu Pendidikan*. Yogyakarta. UGM.